

## Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Nasional dan Membangun Negeri di Pasar Internasional

**Irfi Silvia Amanda**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: irfisolviaamanda21@gmail.com

**Maulana Shihabudin**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: 1111190146@untirta.ac.id

**Belardo Prasetya Mega Jaya**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: Belardoprasetya@gmail.com

**Mohammad Fasyehhudin**

Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa  
Jl. Raya Palka KM. 03 Sindangsari Pabuaran Kab. Serang  
E-mail: fasyehhudin@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v1i2>.

---

### Info Artikel

| Submitted: 29 Desember 2021

| Revised: 10 April 2022

| Accepted: 12 April 2022

How to cite: Irfi Silvia Amanda, Maulana Shihabudi, Belardo Prasetya Mega Jaya, Mohammad Fasyehhudin, "Peran Pemerintah dalam Pengembangan UMKM Nasional dan Membangun Negeri di Pasar Internasional", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 2 No. 1, (April, 2022)", hlm. 1-7.

---

### ABSTRACT:

*One of the goals of the The Micro, Small, and Medium enterprises (MSMEs) establishment is a develop businesses in the context of building a national economy based on just democracy in accordance with Pancasila and the Constitution. In developing MSMEs, it's necessary to have support from several parties which will encourage MSMEs to develop more. Some of the problems that often confront MSMEs are limited capital sources, lack of human resource skills, and lack of education and technology. Whereas MSMEs have contributed to creating job opportunities and increasing competition and increasing GDP. Therefore, this study aims to examine the role of the government so that MSMEs can develop the country in the international market. This research used normative legal research. The results of this study are that the competitiveness of MSME products must continue to follow the times and market demand, especially in terms of product quality and price because MSMEs affect national growth and development. This development requires the participation of all parties, especially between business actors and the government.*

**Keyword:** MSMEs, Role of Government, Growth, Development

### **ABSTRAK**

Salah satu tujuan dari dibentuknya UMKM adalah sebagai pengembangan dan pembangunan usaha dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi berkeadilan sesuai dengan Pancasila serta UUD. Dalam pengembangan UMKM perlu adanya dukungan dari beberapa pihak yang akan mendorong UMKM lebih berkembang. Beberapa hal permasalahan yang sering sekali menghadang UMKM, yaitu terbatas dalam sumber permodalan, keterampilan sumber daya manusia yang kurang, dan minimnya pendidikan dan teknologi. Padahal UMKM telah berkontribusi membuka lapangan kerja dan meningkatkan persaingan serta peningkatan PDB. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk memelaah peran pemerintah agar UMKM dapat membangun negeri di pasar internasional. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative. Hasil penelitian ini adalah bahwa daya saing produk UMKM harus terus mengikuti perkembangan zaman dan permintaan pasar terutama dalam hal kualitas produk dan harga karena UMKM berpengaruh terhadap pertumbuhan serta pembangunan nasional. Dalam perkembangan ini diperlukan peran serta semua pihak terutama antara pelaku usaha dan pemerintah.

**Kata Kunci :** *UMKM, Pertumbuhan, Pembangunan*

## **Pendahuluan**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan serta pengembangan ekonomi di Indonesia, salah satunya keterlibatan Usaha Mikro, kecil dan menengah. Menurut UUD NRI Tahun 1945 psal 33 ayat 4 UMKM adalah aset perekonomian nasional yang berwawasan kemandirian dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. UMKM juga memiliki peran yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM, Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi.<sup>1</sup>

UMKM menjadi faktor pengaruh besar terhadap pendapatan negara. Selain juga bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, UMKM mampu juga meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat serta mengurangi angka pengangguran. Sebab, banyaknya UMKM yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan memperkerjakan jutaan tenaga kerja.<sup>2</sup> UMKM berperan menjadi bagian yang penting dalam pembangunan serta pertumbuhan ekonomi.<sup>3</sup>

UMKM sangat berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi negara Indonesia, maka dari itu diperlukan

peranan yang sangat besar dari pemerintah untuk membantu serta memfasilitasi UMKM agar bisa bersaing di kancah internasional. Dari latar belakang ini, penulis tertarik membuat penelitian yang berjudul peran pemerintah dalam pengembangan UMKM Nasional dan membangun negeri di pasar internasional.

## **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan pada penelitian ini berfokus pada studi literatur dimana, penulis mengumpulkan, menganalisis serta mengolah data. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis, dan pendekatan komparasi.

Pendekatan penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat dari permasalahan. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik kepustakaan dengan analisis data secara deskriptif.

## **Hasil dan Pembahasan Peran Pemerintah dalam Mengembangkan UMKM Nasional**

UMKM mampu menjadi pertumbuhan bidang ekonomi dengan nyata untuk membangkitkan perekonomian di Indonesia. UMKM sebagai penggerak utama ekonomi nasional, yang mampu bertahan saat ini.

---

<sup>1</sup> "BPKM, Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia, Bpkm.Go.Id: <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>. (Diakses Pada 17 Desember 2021).," n.d.

<sup>2</sup> Ai Siti Farida, *Sistem Ekonomi Indonesia*

(Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011)hl, 44.

<sup>3</sup> "Ahmad Raihan Nuari, 'Pentingnya Usaha Kecil Menengah (UKM) Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu, 12 Oktober 2017, <https://doi.org/10.31227/osf.io/q5sa2>. Diakses (Pada Tanggal 17 Desember 2021).," n.d.

Kesempatan dan prospek serta potensi UMKM nasional sangat besar dan menjanjikan. Pemberdayaan UMKM merupakan kekuatan dan potensi besar bagi perekonomian masa depan dan perlu dilakukan pengembangan.

UMKM harus menciptakan ide dan inovasi baru agar dapat bersaing dengan usaha-usaha lain. UMKM juga harus beradaptasi dengan berbagai macam hal dan dituntut untuk terus berinovasi dan kreatif serta mengikuti perkembangan era globalisasi. Untuk merealisasikan pengembangan ini, UMKM juga harus dapat membuat produk berupa barang atau jasa yang mempunyai nilai tambah berupa kearifan lokal. Dimana menurut Tama (2012) sebagaimana dikutip Wijayanto (2012) menyebutkan diantaranya untuk konservasi dan pelestarian sumber daya alam, pengembangan sumber daya manusia, pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan.<sup>4</sup> Produk ataupun jasa yang ditawarkan dan diproduksi UMKM harus memiliki kekuatan *Local Wisdom*.

Dengan demikian, harus adanya penyuluhan serta pemberdayaan di UMKM agar mempunyai semangat juang yang tinggi dan memiliki daya saing secara kompetitif dengan produk-produk manca negara lainnya di pasar global dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dengan menjadikan Indonesia sebagai negara maju.

Pemerintah terkhusus Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan UMKM berkolaborasi untuk

mendukung pengusaha UMKM dalam menembus pasar global serta pasar ekspor. Terdapat beberapa hal penting yang perlu dilakukan guna mendorong UMKM berkalah di bidang ekspor, antara lain meningkatkan kualitas produk UMKM, percepatan birokrasi perizinan usaha serta pemberian informasi tentang potensi pasar dan informasi pemasaran bagi UMKM dalam memasarkan produknya.

Pemerintah juga harus mempermudah para pelaku usaha dalam mengakses layanan informasi dan perizinan ekspor serta impor barang, dengan pengadaan fasilitas serta memberikan informasi mengenai peluang pasar, peraturan pajak keluar, dan peraturan negara yang akan dituju melalui lembaga kementerian keuangan. Demi berperan aktif untuk memajukan UMKM nasional pemerintah berupaya melakukan beberapa hal, sebagai berikut:<sup>5</sup>

1. Melalui penyusunan Undang-Undang Cipta Kerja yang telah disahkan pada tahun 2020 pemerintah berperan mengakomodir melalui penyusunan Undang-undang tersebut. Salah satu substansi yang menyangkut UMKM adalah kemudahan tentang perlindungan dan pemberdayaan UMKM. Harapan pemerintah lewat UU Cipta Kerja ini adalah memungkinkan bagi UMKM untuk dapat terus melakukan inovasi pengembangan dan

---

<sup>4</sup> Supatmi, "Local Wisdom: Deskripsi, Tantangan, Dan Peluangnya Dalam Penelitian Interpretif," *Perspektif Akuntansi* 2, no. 2 (2019): 121-141.

<sup>5</sup> "BPKM, Upaya Pemerintah Untuk

Memajukan UMKM Indonesia, Bpkm.Go.Id: <https://www.bkpm.go.id/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia>. (Diakses Pada 17 Desember 2021)."

- dapat bersaing secara kompetitif.
2. Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2020 yang diubah menjadi PP Nomor 43 tahun 2020, Program PEN merupakan salah satu program yang diinisiasi oleh pemerintah sebagai respon atas penurunan aktivitas masyarakat yang terdampak, khususnya sektor informal atau UMKM.
  3. Kredit Usaha Rakyat (KUR)  
Pemerintah menghadirkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan melalui lembaga keuangan sebagai upaya pemberdayaan dan pembangunan UMKM.
  4. Pemerintah sebagai fasilitator  
Sebagai fasilitator, pemerintah bertanggung jawab membantu UMKM mencapai tujuan pengembangan usahanya. Apabila UMKM memiliki kekurangan pada bidang produksi, tugas fasilitator adalah memberikan keterampilan lewat berbagai cara, contohnya diadakan pelatihan sertifikasi. Pada sektor pendanaan juga pemerintah sebagai fasilitator memiliki tugas mencari alternatif pilihan agar UMKM mendapat pendanaan sebagai sumber modal yang dibutuhkan.

Peran pemerintah tersebut diharapkan dapat mendorong peningkatan munculnya UMKM di Indonesia dan memajukan pengembangan UMKM serta pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Dalam upaya upaya yang

dilakukan ini, diharapkan juga lapangan kerja terbuka lebar sehingga potensi kemiskinan dan persentase jumlah pengangguran dapat menurun. Pemerintah perlu mengimplementasikan konsep korporatisasi UMKM agar kontribusi UMKM semakin luas. Hal tersebut mengelompokkan usaha kecil sejenis dalam satu koperasi, dan selanjutnya koperasi-koperasi tersebut membuat Badan Usaha Milik Rakyat (BUMR) dalam bentuk Perseroan Terbatas. Jika konsep ini berhasil akan memberikan kemudahan perbankan karena mempunyai nasabah yang cukup besar sehingga bisa dikomparasikan dan mengangkat UMKM yang berpotensi.<sup>6</sup>

### **Peran Pemerintah dalam Mengembangkan UMKM di Pasar Internasional**

Pengembangan Perkembangan di masa sekarang yang semakin pesat dan pengaruh arus globalisasi serta persaingan pasar global yang tinggi, menuntut UMKM untuk terus mampu menghadapi tantangan, seperti pengembangan produk dan jasa lewat inovasi, peningkatan keterampilan dan teknologi yang digunakan, serta perluasan jangkauan pemasaran. Tidak dapat dipungkiri bahwa adanya UMKM telah terbukti layak dan dikembangkan sebagai mesin penggerak perekonomian, terutama pasca krisis ekonomi yang sempat dialami Indonesia. Dalam hal tersebut maka perlu dilakukan pengembangan untuk meningkatkan nilai tambah UMKM, terutama untuk

---

<sup>6</sup> "Asikin, M. N, 'BRI Tegaskan Komitmen Penyelamatan UMKM Di Masa Pandemi'. Retrieved from <https://Today.Line.Me/Id/>

v2/Article/BRI+Tegaskan+Komitmen+Pe Nyelamatan+UMKM+di+Masa+Pandemi- Qe06aj. (Diakses Pada 17 Desember 2021).," n.d.

bersaing secara kompetitif dengan produk luar negeri yang semakin mendominasi sektor industri dan manufaktur Indonesia.

Untuk menguasai pasar, UMKM perlu memperoleh informasi pasar dan pasar faktor produksi secara cepat dan instan guna memperlebar jangkauan pemasaran produk-produk hasil UMKM. Bentuk penerapan teknologi informasi akan memudahkan UMKM untuk memperluas jangkauan pasar baik secara regional maupun internasional. Pembuatan suatu sentra pengembangan UMKM berbasis teknologi diperkirakan mampu meningkatkan perkembangan dan pertumbuhan di era teknologi informasi seperti dewasa ini. Dalam hal peningkatan daya saing harus adanya kerjasama antara pemerintah sebagai pemegang kebijakan dengan perusahaan/lembaga terkait, terutama perusahaan/lembaga peminjaman modal untuk mempermudah akses perkreditan dan lembaga lain dalam hal perluasan jaringan informasi pemasaran.

Salah satu organisasi yang mewadahi UMKM secara global adalah *United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL)* atau Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Perdagangan Internasional.<sup>7</sup> Selain itu juga, *ASEAN online Sale Day (AOSD)*. Atau Hari Belanja Daring Asean merupakan acara belanja yang dilakukan secara bersama oleh platform niaga-elektronik di sepuluh negara ASEAN. Hal yang perlu dikembangkan dalam memperkuat perekonomian nasional lewat UMKM adalah kecintaan terhadap

produk lokal nusantara. AOSD merupakan kesempatan bagi Indonesia untuk memasarkan dan mempromosikan produk lokal nusantara serta membangun citra positif ke negara-negara ASEAN. Kegiatan ini dapat meningkatkan jumlah ekspor Indonesia dan produk-produk UMKM Indonesia dikenal oleh masyarakat internasional.

Melihat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang UMKM dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, belum ditemukan pengaturan secara spesifik tentang pendirian secara formal suatu UMKM dan hanya menetapkan klasifikasi UMKM berdasarkan berbagai aspek, termasuk pemasukan yang di dapatkan. Dengan adanya mekanisme pendirian formal UMKM yang diharapkan dan dikolaborasikan dengan fasilitas lain dari pemerintah yang telah berjalan di bidang perizinan maupun pembiayaan, pasti kesempatan untuk berkembang akan terbuka dan tumbuhnya UMKM baru di Indonesia. Adapun kaitannya UMKM dengan teknologi, yaitu dengan mendigitalisasikan segala usaha agar dapat dijangkau masyarakat luas. Gagasan pengembangan UMKM melalui media dan sarana digital telah menjadi tujuan dalam pemberian bantuan teknis oleh berbagai organisasi internasional, salah satunya *United Nations Industrial Development Organizations (UNIDO)* karena dinilai akan mampu membantu dan menciptakan pasar yang lebih luas.

---

<sup>7</sup> "Rahmat Kurniawan, 'Pengembangan UMKM Dalam Tataran Global', *Ekonomi Bisnis*, 17 November 2020:

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20201117/9/1318732/pengembangan-umkm-dalam-tataran-global>. (Diakses Pada 17 Desember 2021).," n.d.

## Penutup

Produk UMKM harus memiliki daya saing yang terus terus dibenahi dalam hal kualitas dan harga, agar angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia dapat menurun serta dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Pemerintah perlu menerapkan serta mengimplementasikan konsep kerjasama UMKM agar kontribusi UMKM dalam pertumbuhan ekonomi semakin luas.

Untuk meningkatkan kualitas produk serta berdaya saing diperlukan peran aktif pemerintah sebagai pembuat kebijakan dan akses informasi mengenai pasar. Contohnya mempermudah proses peminjaman modal dan penerapan teknologi dalam hal perluasan jaringan informasi mengenai pemasaran global.

## Saran

Agar dapat menguasai dan masuk ke dalam perdagangan internasional diharapkan pemerintah dapat berperan aktif untuk terus mengikuti perkembangan informasi serta isu-isu terkini tentang UMKM di berbagai *discussion board international* serta melakukan penyuluhan kepada UMKM dimana hasil pembahasan yang berhubungan dengan perdagangan di Indonesia dapat menjadi masukan untuk perencanaan pengembangan usaha-usaha secara nasional dan internasional.

## Daftar Pustaka

Ahmad Raihan Nuari, 'Pentingnya Usaha Kecil Menengah (UKM) Untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu, 12 Oktober 2017, <https://doi.org/10.31227/osf.i>

o/Q5sa2. Diakses (Pada Tanggal 17 Desember 2021.)," n.d.

Asikin, M. N, 'BRI Tegaskan Komitmen Penyelamatan UMKM Di Masa Pandemi'. Retrieved from <https://today.line.me/id/v2/article/BRI+Tegaskan+Komitmen+PeNyelamatan+UMKM+di+Masa+Pandemi-Qe06aj>. (Diakses Pada 17 Desember 2021.)," n.d.

BPKM, Upaya Pemerintah Untuk Memajukan UMKM Indonesia, [Bkpm.Go.Id: https://www.bkpm.go.id](https://www.bkpm.go.id)/id/publikasi/detail/berita/upaya-pemerintah-untuk-memajukan-umkm-indonesia. (Diakses Pada 17 Desember 2021.)," n.d.

Farida, Ai Siti. *Sistem Ekonomi Indonesia*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2011.

Rahmat Kurniawan, 'Pengembangan UMKM Dalam Tataran Global', *Ekonomi Bisnis*, 17 November 2020: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20201117/9/1318732/pengembangan-umkm-dalam-tataran-global>. (Diakses Pada 17 Desember 2021.)," n.d.

Supatmi. "Local Wisdom: Deskripsi, Tantangan, Dan Peluangnya Dalam Penelitian Interpretif." *Perspektif Akuntansi* 2, no. 2 (2019): 121-41.